

**MODEL INTEGRASI
SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN TAGIHAN (SINTAG)
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA BIRO KEUANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Disusun Oleh:

NAMA : CIPTO JUWANTO
NPM : 2243021014
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Cipto Juwanto
NPM : 2243021014
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Magister Terapan Administrasi Pembangunan
Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Model Integrasi Sistem Informasi
Pengendalian Tagihan (SINTAG) dan Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
Pada Biro Keuangan BPK RI
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Integration Model of SINTAG and SAKTI at
the Financial Bureau of the Audit Board of the
Republic of Indonesia*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



Prof. Dr. R. Luki Karunia S.E., Ak., MA.

Pembimbing II



Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si.

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : CIPTO JUWANTO
NPM : 2243021014
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : MAGISTER TERAPAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TESIS : MODEL INTEGRASI SINTAG DAN SAKTI PADA
BIRO KEUANGAN BPK RI

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Nopember 2023
Pukul : 15.00 – 16.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA. :

Sekretaris : Arifiani Widjayanti, M.Si., Ph.D. :

Anggota : Dr. Edy Sutrisno, M.Si. :

Pembimbing 1 : Prof. Dr. R. Luki Karunia, M.A. :

Pembimbing 2 : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si. :



(Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Firman' and the NPM number '2243021014')

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cipto Juwanto
NPM : 2243021014
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul “Model Integrasi Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Biro Keuangan BPK RI” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, November 2023

Penulis



Cipto Juwanto

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah subhānahu wataʿālā, atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Model Integrasi Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Biro Keuangan BPK RI”.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Terapan pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA. selaku Dosen Pembimbing I.
2. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II.
3. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
4. Orang tua, istri, keluarga, dan seluruh rekan yang telah memberikan doa dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, Nopember 2023

Cipto Juwanto

ABSTRAK

Model Integrasi Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Biro Keuangan BPK RI

Cipto Juwanto, R. Luki Karunia, Neneng Sri Rahayu

cipto.2243021014@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis proses kerja dan kualitas informasi dari SINTAG dan SAKTI serta menyusun Model Integrasi SINTAG dan SAKTI pada proses penyelesaian tagihan surat pertanggungjawaban keuangan negara yang dapat diterapkan pada Biro Keuangan BPK RI. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, telaah dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kerja SINTAG dan SAKTI sudah baik berdasarkan perspektif orientasi pengguna dan keunggulan operasional yang dimilikinya masing-masing. SINTAG dan SAKTI juga telah mampu menghasilkan informasi laporan realisasi anggaran dan data pembayaran yang akurat dan tepat waktu untuk tagihan yang dibayarkan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) maupun Langsung (LS). Model Integrasi SINTAG dan SAKTI disusun dengan melakukan perubahan atas posisi penggunaan SINTAG, dokumen sumber penginputan SAKTI, dokumen dasar rekonsiliasi, dan posisi pelaksanaan rekonsiliasi SINTAG dan SAKTI.

Kata kunci: sistem informasi keuangan negara, model integrasi, SINTAG, dan SAKTI

ABSTRACT

Integration Model of SINTAG and SAKTI at the Financial Bureau of the Audit Board of the Republic of Indonesia

Cipto Juwanto, R. Luki Karunia, Neneng Sri Rahayu

galih.2243021082@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

This research aims to explain the analysis of work processes and information quality from SINTAG and SAKTI and compile a SINTAG and SAKTI Integration Model in the process of completing state financial accountability bills that can be applied to the BPK RI Finance Bureau. The method used is the descriptive qualitative research method. Data collection is done through observation, document review, and interviews. The results showed that the work processes of SINTAG and SAKTI are good based on the perspective of user orientation and operational excellence that each has. SINTAG and SAKTI have also been able to produce accurate and timely information on budget realization reports and payment data for bills paid with the Supply Money (UP) and Direct (LS) mechanisms. The SINTAG and SAKTI Integration Model is prepared by making changes to the position of SINTAG usage, SAKTI input source documents, reconciliation base documents, and the position of SINTAG and SAKTI reconciliation implementation.

Keywords: state financial information system, integration model, SINTAG, and SAKTI

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan Orginalitas	Iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	17
C. RUMUSAN PERMASALAHAN.....	18
D. TUJUAN PENELITIAN.....	18
E. MANFAAT PENELITIAN.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. PENELITIAN TERDAHULU	20
B. TINJAUAN KEBIJAKAN.....	33
C. TINJAUAN TEORITIS.....	35
1. Sistem Informasi Manajemen.....	36
2. <i>IT Balanced Scorecard</i>	48
3. Kualitas Informasi.....	57
4. Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG).....	65
5. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).....	66
D. KERANGKA BERPIKIR.....	67
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	70
A. METODE PENELITIAN	70

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	72
1. Observasi	73
2. Wawancara	73
3. Telaah Dokumentasi.....	76
C. TEKNIK PENGOLAHAN DAN VALIDITAS DATA	76
1. Teknik Pengolahan Data	76
2. Teknik Validitas Data (Triangulasi).....	79
D. INSTRUMEN PENELITIAN.....	80
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	83
A. GAMBARAN UMUM PENELITIAN	83
B. HASIL PENELITIAN	90
1. Proses Kerja SINTAG dan SAKTI	92
a) Perspektif Orientasi Pengguna (<i>User Orientation</i>)	94
b) Perspektif Keunggulan Operasional (<i>Operational Excellent</i>)	106
2. Kualitas Informasi SINTAG dan SAKTI	125
a) Aspek Akurasi Informasi (<i>Accurate</i>)	126
b) Aspek Ketepatan Waktu Informasi (<i>Timelines</i>)	141
3. Model Integrasi SINTAG dan SAKTI	152
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	162
A. KESIMPULAN	162
B. SARAN	163
Daftar Pustaka.....	165
Lampiran-Lampiran	
Riwayat Hidup Penulis	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tampilan Awal SINTAG	7
Gambar 1.2 Tampilan Awal Modul SAKTI	9
Gambar 1.3 Ilustrasi Proses Penyelesaian SPJ Keuangan Negara pada BPK ..	10
Gambar 1.4 Tampilan Menu Rincian Tagihan	13
Gambar 2.1 Sistem Informasi Manajemen	39
Gambar 2.2 Alternatif Integrasi Sistem Informasi Manajemen	45
Gambar 2.3 <i>Strategies for Information Technology Governance</i>	46
Gambar 2.4 <i>An Integrated Perspective</i>	47
Gambar 2.5 <i>Traditional BSC dan IT BSC</i>	51
Gambar 2.6 <i>Generic IT Balanced Scorecard</i>	52
Gambar 2.7 <i>IT Strategic Scorecard Framework</i>	53
Gambar 2.8 Indikator <i>IT Balance Scorecard</i>	55
Gambar 2.9 Pilar Kualitas Informasi	58
Gambar 2.10 Siklus Informasi	63
Gambar 2.11 Kerangka Berpikir	69
Gambar 3.1 Teknik Pengolahan Data	77
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPK RI	84
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Biro Keuangan BPK RI	86
Gambar 4.3 Rekapitulasi Tagihan SPJ Keuangan Negara Tahun 2022	88
Gambar 4.4 Narasumber Penelitian	91
Gambar 4.5 Tampilan Awal SINTAG	94
Gambar 4.6 Tabel SINTAG	95
Gambar 4.7 Tampilan Awal SAKTI	96
Gambar 4.8 Menu Tabel Pengguna di SAKTI	96
Gambar 4.9 Menu Pengajuan Tagihan dan Kontrak oleh Satuan Kerja di SINTAG	100
Gambar 4.10 Menu Pencatatan di SINTAG	101
Gambar 4.11 Menu Dokumen Dikembalikan oleh Keuangan di SINTAG	102
Gambar 4.12 Proses Penyelesaian Tagihan SPJ di SINTAG dan SAKTI	103
Gambar 4.13 Menu Input Rincian Tagihan di SINTAG	107
Gambar 4.14 Menu Administrasi Kontrak di SINTAG	108
Gambar 4.15 Menu Realisasi Kontrak di SINTAG	109
Gambar 4.16 Menu Mencatat Perintah Bayar di SAKTI	110
Gambar 4.17 Tampilan Detail COA (Pembebanan) di SAKTI	111

Gambar 4.18 Menu Pencatatan Informasi P3DN di SAKTI	112
Gambar 4.19 Menu Kontrak di SAKTI	113
Gambar 4.20 Menu Mencatat BAST Kontraktual di SAKTI	113
Gambar 4.21 Menu Catat/Ubah SPP di SAKTI	114
Gambar 4.22 Fitur Daftar Transaksi pada SINTAG	116
Gambar 4.23 Menu Input Kelengkapan Data Tagihan (Pembebanan) di SINTAG	118
Gambar 4.24 Menu Workdesk di SINTAG	119
Gambar 4.25 Menu Validasi Perintah Bayar di SAKTI	120
Gambar 4.26 Menu Validasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) di SAKTI	121
Gambar 4.27 Menu ADK SPP OTP di SAKTI	121
Gambar 4.28 Proses Wawancara dengan Bapak Farid Direktorat SITP	123
Gambar 4.29 Menu Lap. Sisa Pagu Anggaran di SINTAG	127
Gambar 4.30 Menu Lap. FA Detail di SAKTI	127
Gambar 4.31 Laporan Realisasi Anggaran di SINTAG	130
Gambar 4.32 Laporan Realisasi Anggaran di SAKTI	131
Gambar 4.33 Diskusi PPK terkait Laporan Realisasi Anggaran	132
Gambar 4.34 Menu Input Kelengkapan Data Tagihan (Pajak) di SINTAG	133
Gambar 4.35 Menu Membuat Kuitansi di SAKTI	134
Gambar 4.36 Menu Mencatat Pungutan Pajak di SAKTI	135
Gambar 4.37 Menu Mencatat Setoran Pajak di SAKTI	135
Gambar 4.38 Menu Antrian Dokumen PPPSPM di SINTAG	136
Gambar 4.39 Menu Mencetak SPM di SAKTI	137
Gambar 4.40 Menu Upload Dokumen Pendukung di SAKTI	138
Gambar 4.41 Menu Validasi SPM di SAKTI	138
Gambar 4.42 Menu Generate Data E-Transfer Perjadin di SINTAG	141
Gambar 4.43 Menu Pembayaran Massal	142
Gambar 4.44 Menu Pembayaran Pajak dengan E-Tax di SINTAG	143
Gambar 4.45 Menu Unggah MPN G3	144
Gambar 4.46 Menu ADK SPM OTP di SAKTI	145
Gambar 4.47 Menu Menu Monitoring SPP di SAKTI	145
Gambar 4.48 Menu Rekap Dokumen Tagihan Sedang Berjalan	147
Gambar 4.49 Proses Perbaikan Data Tagihan di SINTAG	149
Gambar 4.50 Proses Batal Validasi di SAKTI	149
Gambar 4.51 Model Proses Penyelesaian Tagihan SPJ Keuangan Negara Sebelumnya	154
Gambar 4.52 Model Integrasi SINTAG dan SAKTI Mekanisme	

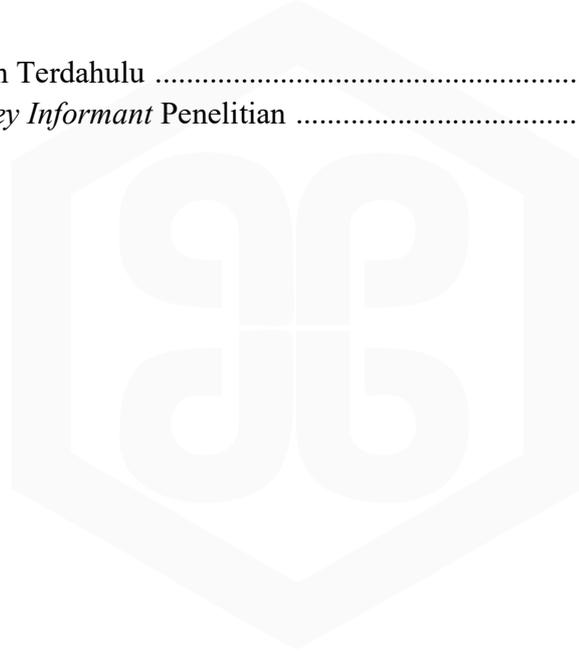
Uang Persediaan (UP)	155
Gambar 4.50 Model Integrasi SINTAG dan SAKTI Mekanisme	
Langsung (LS)	157



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Daftar <i>Key Informant</i> Penelitian	74



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tujuan utama dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh wilayah di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kecerdasan hidup masyarakat, dan ikut melaksanakan menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan bagi seluruh negara di dunia, perdamaian yang kekal, dan keadilan di masyarakat sebagaimana telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Agar tujuan tersebut tercapai dibutuhkan sebuah proses pengendalian usaha oleh negara/pemerintah yang dapat merealisasikan pertumbuhan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa yang terangkum dalam bidang administrasi pembangunan negara atau administrasi publik. Chandler dan Plano pernah menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses ketika semua sumber daya yang dimiliki dan juga masyarakat dilakukan pengorganisasian dan pengkoordinasian untuk menciptakan formula, melakukan implementasi dan pengelolaan keputusan serta kebijakan publik

Manajemen keuangan negara yang merupakan bagian administrasi publik memegang peranan penting terhadap keberlangsungan serta keberlanjutan proses pembangunan di segala bidang. Manajemen keuangan negara diterjemahkan sebagai

segala usaha atau peran yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan negara yang merangkum berbagai usaha untuk menghasilkan pendapatan, melakukan alokasi dana publik, melakukan pengeluaran, kebijakan pembiayaan, hingga tahap pemeriksaan. Dalam melakukan pengeluaran, anggaran harus digunakan dengan ekonomis, efektif, dan efisien yang memiliki tujuan untuk menghasilkan pemerataan dan keadilan dan bukan mencari keuntungan sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Abdul Halim.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah segala sesuatu yang berhak diterima dan ditunaikan oleh negara yang bisa dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dimiliki negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di atas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang didirikan dengan tujuan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Segala kegiatan pemeriksaan dan keorganisasian BPK tersebut telah diatur dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945.

Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, Biro Keuangan BPK memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkup BPK Pusat yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Biro Keuangan BPK terdiri atas: Bagian Penganggaran dan Pemantauan (PP), Bagian Perbendaharaan, Bagian Akuntansi Pelaporan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian

Perbendaharaan Biro Keuangan BPK mempunyai tugas melakukan segala kegiatan yang terkait dengan perbendaharaan di BPK Pusat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perbendaharaan memiliki fungsi-fungsi seperti: menyiapkan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan data terkait tugas perbendaharaan dalam menyusun Laporan Keuangan BPK, menyiapkan bahan analisa terkait pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola Anggaran dan Bendahara, dan penyiapan bahan penyusunan LAKIP.

Oleh karena itu, pekerjaan di Biro Keuangan BPK RI membutuhkan sumber daya manusia yang berkemampuan teliti, cepat, dan tepat dalam mengelola setiap dokumen surat pertanggungjawaban keuangan negara. Selain itu, dibutuhkan pencatatan keberadaan arsip dokumen secara terstruktur karena setiap arsip dokumen surat pertanggungjawaban keuangan merupakan dokumen penting yang akan dilakukan pemeriksaan kembali oleh Inspektorat Utama dan Kantor Akuntan Publik secara periodik.

Secara kuantitas, jumlah dokumen surat pertanggungjawaban keuangan negara yang harus dikelola oleh Biro Keuangan BPK sangatlah banyak. Pada Tahun Anggaran 2022, Biro Keuangan BPK mengelola sebanyak 37.820 dokumen pertanggungjawaban keuangan negara dengan nilai total Rp3.018.732.860.330. Dokumen surat pertanggungjawaban keuangan negara tersebut berasal dari semua satuan kerja yang ada di BPK RI sangatlah banyak yaitu terdiri dari satu unit kerja Sekretariat Jenderal, satu unit kerja Inspektorat Utama, satu unit kerja Direktorat

Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksa Keuangan Negara, satu unit kerja Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan, tujuh unit kerja Auditorat Utama Keuangan Negara, satu unit kerja Auditorat Utama Investigasi, lima unit kerja Staf Ahli, dan tiga puluh empat BPK RI Perwakilan pada masing-masing provinsi.

Agar pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dibutuhkan strategi pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat Reformasi Birokrasi. Sebuah konsep mengelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi digital sesuai pada prinsip keamanan informasi, interoperabilitas, akuntabilitas, efisiensi, kesinambungan, keterpaduan, dan efektivitas.

Teknologi digital merupakan teknologi yang dikembangkan dengan menggunakan basis teknologi komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi yang berkelanjutan telah menciptakan sebuah aplikasi yang dapat melakukan proses pengolahan data sampai menghasilkan informasi. Teknologi digital kini menjadi teknologi yang lebih berkembang pesat dan berpengaruh dibandingkan teknologi computer, yang sebelumnya hanya digunakan dalam proses menghitung. Pada prinsipnya aplikasi teknologi digital ialah alat yang membantu manusia untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang berharga. Informasi tersebut kemudian digunakan oleh manusia, secara *direct* maupun *indirect* untuk menjalankan

tugas dan pekerjaannya. Implementasi teknologi digital di dalam kehidupan sehari-hari akan selalu berubah lebih maju mengikuti kebutuhan manusia yang semakin bervariasi dan kompleks.

Begitu pula juga dengan lingkungan Kementerian/Lembaga, teknologi informasi digital dimanfaatkan dalam penyelesaian pekerjaan, mulai dari kegiatan administrasi pemerintahan hingga pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital di Kementerian/Lembaga antara lain adalah sebagai alat untuk membantu dalam proses administrasi, komputerisasi, pusat data, sistem informasi, proses administrasi dan pemerintahan. pusat data informasi, sistem informasi manajemen, persuratan dan pengarsipan yang menggunakan internet dan komputer.

Dalam hal penggunaan teknologi informasi digital, Biro Keuangan BPK sudah menggunakannya dalam proses pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara sejak Tahun Anggaran 2010. Biro Keuangan BPK bekerja sama dengan pihak penyedia PT. Nusantara Sistik Integra membangun sebuah sistem yang dapat memberikan kemudahan dan kecepatan proses pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara hingga dapat memberikan laporan yang transparan dan akuntabel. Sistem yang dibangun tersebut diberi nama Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG).

SINTAG merupakan salah satu dari rencana kerja pada unit Biro Keuangan yang pendanaannya telah dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran BPK-RI yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disusun dengan prinsip

anggaran berbasis kinerja. Rencana pembuatan SINTAG berlandaskan pada sasaran strategis Biro Keuangan yang disusun untuk menunjang tercapainya tujuan strategis BPK. Penyusunan sasaran strategis dan KPI Biro Keuangan adalah hasil turunan (*cascading*) dari visi, misi dan rencana strategis BPK.

SINTAG digunakan mulai dari tahap proses pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara pada setiap satuan kerja di lingkungan BPK. SINTAG kemudian akan mengirimkan dokumen surat pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh satuan kerja kepada pengguna Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian, PPK akan melakukan pengujian dokumen tagihan surat pertanggungjawaban dengan menggunakan berbagai fitur pengujian dan pengendalian tagihan yang tersedia di SINTAG seperti fitur tanggal perjalanan dinas bentrok atau pemantauan dokumen sebelumnya yang belum dilakukan pertanggungjawaban. PPK juga melakukan pembebanan anggaran di SINTAG yang akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran. Apabila dokumen surat pertanggungjawaban sudah dinyatakan lengkap PPK akan mengirimkan dokumen tersebut ke pengguna Bendahara Pengeluaran untuk dibayarkan melalui SINTAG. Namun, apabila dokumen surat pertanggungjawaban dinyatakan belum memenuhi ketentuan berlaku, PPK melalui SINTAG juga akan mengembalikan dokumen tersebut ke pengguna Satuan Kerja.

SINTAG juga memberikan kemudahan bagi Bendahara Pengeluaran dalam melakukan proses pembayaran surat pertanggungjawaban keuangan negara. Pada SINTAG terdapat fitur yang dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank

seperti BNI Direct. Kemudian terdapat fitur pula untuk melakukan penghitungan dan penyeoran pajak. SINTAG juga menyediakan fitur Buku Kas Umum yang membantu Bendahara Pengeluaran melakukan proses pembukuan dan memantau saldo kas.

Gambar 1.1: Tampilan Awal



Sumber: Aplikasi SINTAG

Seiring berjalannya waktu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia membangun sebuah sistem aplikasi yang mengintegrasikan semua sistem aplikasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Sistem tersebut bernama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah sistem yang dibuat untuk mengintegrasikan proses penyusunan rencana dan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) pada seluruh instansi pemerintah sebagai bagian sistem pengelolaan keuangan negara.

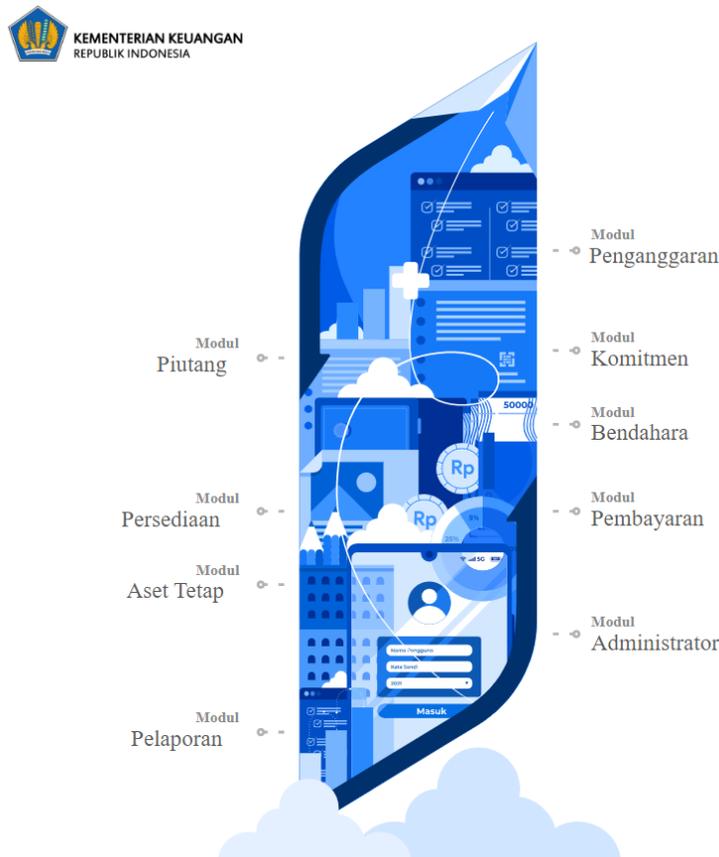
SAKTI terdiri dari beberapa modul yang memiliki fungsi masing-masing. Modul pada aplikasi SAKTI meliputi modul aset tetap, modul persediaan, modul akuntansi dan pelaporan, modul piutang, modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, dan modul administrasi. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menggunakan aplikasi yang berbeda-beda pada setiap tahapan misalnya aplikasi RKAKL pada tahap perencanaan, aplikasi SAS pada tahap pelaksanaan, dan aplikasi SAIBA pada tahap pelaporan. Namun, kini semua fungsi dari aplikasi tersebut telah disatukan menjadi satu aplikasi SAKTI yang dipisahkan dalam beberapa modul. Pada proses penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara, modul yang digunakan adalah Modul Komitmen, Modul Bendahara, dan Modul Pembayaran.

SAKTI merupakan aplikasi *web based* yang menggunakan internet yang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual, *single entry point*, dan *single database*. Adapun penyusunan waktu transaksi mulai dari bulan Januari sampai Desember, baik *unaudited* maupun *audited*. Setiap data yang dihasilkan oleh SAKTI telah dijamin kerahasiaan data, integritas data, dan keaslian data.

SAKTI pada satuan kerja Kementerian/Lembaga memiliki sarana interkoneksi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) berupa Portal SPAN. Dengan implementasi SAKTI, satuan kerja tidak perlu menyampaikan Arsip Data

Komputer ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), namun cukup *log in* ke Portal SPAN dan menggunakan menu yang tersedia untuk mengirim ADK ke SPAN. Begitu pula proses terima data dari SPAN juga dikirimkan melalui Portal SPAN. Portal SPAN memiliki juga fungsi untuk mengecek ADK yang dikirim satuan kerja bahwa ADK yang berasal dari satuan kerja telah benar dan disetujui oleh pejabat berwenang pada satker.

Gambar 1.2: Tampilan Awal Modul



Sumber: Aplikasi SAKTI

Dengan terbitnya PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, maka setiap K/L pada Tahun Anggaran 2022 harus sepenuhnya menggunakan aplikasi SAKTI sebagai bagian dalam sistem pengelolaan keuangan negara termasuk Biro Keuangan BPK. Namun, di sisi lain Biro Keuangan BPK telah merasakan manfaat yang sangat baik dengan penggunaan SINTAG sejak tahun 2010. Akibatnya saat ini Biro Keuangan BPK menggunakan dua sistem aplikasi yang berbeda tetapi sebenarnya memiliki proses, fungsi dan tujuan yang sama.

Gambar 1.3: Ilustrasi Proses Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Negara pada Biro Keuangan BPK



Sumber: Data Diolah Tahun 2023

Biro Keuangan BPK mencoba melakukan berbagai upaya untuk mencoba mengintegrasikan penggunaan kedua aplikasi tersebut dalam satu proses. Biro Keuangan BPK berkoordinasi dengan rekanan penyedia SINTAG dan juga Biro Teknologi Informasi BPK agar dapat melakukan pembaharuan sistem pada SINTAG. Biro Keuangan BPK juga berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk

memberikan masukan terhadap pengembangan SAKTI. Selain itu, Biro Keuangan BPK mencoba melakukan perubahan prosedur operasional standar atas pembayaran setiap dokumen tagihan pertanggungjawaban keuangan negara di Kantor Pusat BPK.

Namun pada faktanya, pelaksanaan proses pertanggungjawaban keuangan negara di Biro Keuangan BPK terdapat berbagai permasalahan yang muncul akibat penggunaan dua sistem aplikasi yang berbeda tersebut. Permasalahan yang terjadi di dalam proses pertanggungjawaban keuangan negara di Biro Keuangan BPK contohnya adalah pelaksanaan dua pekerjaan yang sama atau berulang pada masing-masing akses aplikasi terutama oleh pengguna (*user*) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran. PPK harus melakukan prosedur pengujian dan pembebanan anggaran di SINTAG, kemudian melakukan prosedur tersebut kembali di SAKTI. Bendahara Pengeluaran harus melakukan proses pembayaran dan pembukuan di SINTAG, lalu melakukan prosedur tersebut kembali di SAKTI.

Kemudian pada SINTAG dan SAKTI terdapat banyak perbedaan operasional fitur dan fungsi penginputan serta pelaporan. Penginputan akun keluaran atau pembebanan pada SINTAG hanya pada level mata akun keluaran 6 digit, sedangkan pada SAKTI sampai 16 segmen hingga ke level detail akun. Laporan realisasi anggaran yang dihasilkan oleh SINTAG berdasarkan pada waktu proses pembebanan, sedangkan laporan realisasi anggaran yang dihasilkan oleh SAKTI berdasarkan pada waktu validasi perintah bayar dan dengan format yang berbeda dengan SINTAG.

Selain itu terdapat ketidaksesuaian akun pembebanan, selisih nilai realisasi anggaran, dan perbedaan sisa pagu anggaran antara aplikasi SINTAG dan SAKTI. Setelah dilakukan evaluasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SINTAG dan SAKTI terdapat perbedaan akun pembebanan beberapa tagihan seperti tagihan perjalanan dinas luar kota di SINTAG dibebankan pada akun 524111, sedangkan di SAKTI dibebankan pada akun 524113. Hal itu berdampak seterusnya hingga mengakibatkan perbedaan nilai realisasi dan sisa pagu anggaran.

Sejak penggunaan SINTAG dan SAKTI secara bersamaan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara mulai dari pembuatan dokumen sampai pembayaran tagihan menjadi lebih lambat. Sebelumnya dengan hanya menggunakan SINTAG Biro Keuangan dapat melakukan proses penyelesaian SPJ sampai pembayaran ke rekanan atau pegawai hanya memerlukan waktu 1 hari kerja. Tetapi kini, dengan ditambah penggunaan SAKTI memerlukan waktu hingga 3-7 hari kerja.'

Penggunaan aplikasi digital seharusnya dapat membuat proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara menjadi lebih efektif dan efisien, bukan sebaliknya. Biro Keuangan BPK sudah sejak lama menggunakan aplikasi SINTAG dan sudah memberikan hasil yang positif bagi seluruh pemegang kepentingan di BPK. Tetapi hadirnya aplikasi SAKTI yang diciptakan oleh Kementerian Keuangan juga memiliki arti dalam peningkatan kualitas pengelola keuangan negara dari proses perencanaan hingga pelaporan di setiap Kementrian/Lembaga.

Gambar 1.4: Tampilan Menu Rincian Tagihan

Input Rincian Tagihan

BPK - RI | **Pengendalian dokumen Tagihan**
Cipto Juwanto S.A.P. - Pejabat Pembuat Komitmen

No. Registrasi : R202302686 | Status : SIK

Tgl registrasi : 30/01/2023 | No. Registrasi : R202302686 | Dibuat oleh : Auto Loket | No. Ref : IA2023000545 | **PAPERLESS**

Unit penagih : 3 | 3. Auditorat Utama Keuangan Negara III | Jenis tagihan : Tagihan UP Pusat

Nama penagih : A. A. Ngurah Surya Putra, S.E. | Rekanan

Uraian tagihan : Biaya PS Jakarta ke Jakarta, Semarang, Bandung dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Berdasarkan ST No : 30/STV-XVI.3/01/2023 Tanggal 11 Januari 2023 dan SPD No : 30KT/PS/BPK-RI/AKN III/01/2023 Tanggal 11 Januari 2023 [Rp. 164,653,500]

Nilai tagihan : Rp. 164,653,500 | Corp. Card : 0 | Total : 164,653,500 | Tgl Beban : 30/01/2023 | Tgl BKU : 30/01/2023

DIPA : 2023 DIPA PUSAT | PPK : Cipto Juwanto S.A.P.

No. Surat : 30/STV-XVI.3/01/2023 | Tanggal : 11/01/2023

Tujuan : Jakarta - Jakarta - Semarang - Bandung

Ket. tambahan :
Harus ada SPJ : Ya Tidak | **Hanya untuk TAGIHAN AWAL PD yang harus ada SPJ** (Tidak dapat diubah jika sudah ada dokumen pertanggungjawaban)

Upload Dokumen | **Pembebanan** | Terima Dok Satker | Workdesk | View Dokumen | INTR-SMP | Refresh | Ubah | Rincian Tagihan | Keluar

Perjalanan Dinas: Honor | Kuang Bayar PD | Lain-lain | Uang Makan | Gaji | Tukin dan TPT | Jasa Lainnya | Tunj. Komunikasi | Advance (UM) | NPWP & Rekening Rekanan

■ Nama | Total : 164,653,500 | Pajak : 0 | Netto : 164,653,500 | CC : 0 | Lihat Tgl Kegiatan

#	Kd	Nama Lengkap	NIP	Hari	Tanggal kegiatan	Jumlah
1				75	19 Jan 2023 - 20 Jan 2023, 24 Jan 2023 - 27 Jan 2023, 30 Jan 2023 - 03 Feb 20	31,618.50
2				75	19 Jan 2023 - 20 Jan 2023, 24 Jan 2023 - 27 Jan 2023, 30 Jan 2023 - 03 Feb 20	26,607.00
3				75	19 Jan 2023 - 20 Jan 2023, 24 Jan 2023 - 27 Jan 2023, 30 Jan 2023 - 03 Feb 20	26,607.00
4				75	19 Jan 2023 - 20 Jan 2023, 24 Jan 2023 - 27 Jan 2023, 30 Jan 2023 - 03 Feb 20	26,607.00
5				75	19 Jan 2023 - 20 Jan 2023, 24 Jan 2023 - 27 Jan 2023, 30 Jan 2023 - 03 Feb 20	26,607.00
6				75	19 Jan 2023 - 20 Jan 2023, 24 Jan 2023 - 27 Jan 2023, 30 Jan 2023 - 03 Feb 20	26,607.00

Tambah | Ubah | Hapus | Upload | R. Biaya | Isi NoRek | Reset CC | Ganti Orang

Sumber: Aplikasi SINTAG

Walaupun SAKTI telah hadir, SINTAG di BPK memiliki alasan kuat untuk tetap dipertahankan karena SINTAG telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proses pertanggungjawaban keuangan negara pada BPK Pusat dan juga setiap perwakilan BPK di seluruh Indonesia. Dengan adanya implementasi SINTAG, Biro Keuangan BPK dapat meminimalisir potensi-potensi munculnya kerugian negara akibat kelalaian atau kesalahan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal itu

dikarenakan SINTAG memiliki fitur-fitur yang unggul dan bermanfaat yang tidak terdapat pada SAKTI.

SINTAG memiliki fitur pusat data perjalanan dinas per orang per tanggal yang tidak dimiliki oleh SAKTI. BPK yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tentu memiliki porsi anggaran biaya perjalanan dinas yang besar dan jumlah hari perjalanan dinas yang relatif lama dalam suatu penugasan. Dengan jumlah pegawai sebanyak 9.880 pada tahun 2022, tentu dibutuhkan suatu sistem yang dapat mencegah terjadinya perjalanan dinas ganda pada satu tanggal yang sama atau pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berulang untuk pelaksana perjalanan dinas yang sama.

SINTAG telah menerapkan proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang *paperless*. Setiap dokumen pertanggungjawaban keuangan negara seperti: Kuitansi dari rekanan, Surat Perintah Bayar (SPBy), Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), dan kelengkapan lainnya dapat diunggah dan disimpan pada *server* SINTAG dalam bentuk dokumen elektronik. Untuk memastikan keaslian dan keotentikan dokumen tersebut, SINTAG juga sudah menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang telah disertifikasi oleh Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Saat ini, SAKTI hanya dapat melakukan penyimpanan elektronik untuk kuitansi dan SPBy saja dan belum dilengkapi Tanda Tangan Elektronik.

SINTAG juga dapat menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan keuangan BPK dan menjadi bahan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan di BPK secara cepat. Proses pembebanan anggaran di SINTAG dilakukan tepat setelah PPK melakukan pengujian tagihan dan tagihan dianggap benar. Kemudian SINTAG dapat langsung menampilkan nilai realisasi anggaran kepada Kepala Biro Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris Jendral BPK selaku Pengguna Anggaran, dan pemimpin BPK lainnya secara *realtime*. Sedangkan SAKTI saat ini hanya bisa diakses oleh beberapa pengguna yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan negara saja.

SAKTI merupakan sistem yang diciptakan oleh Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara mulai dari hulu ke hilir. Sehingga setiap data dan informasi yang dihasilkan konsisten mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sampai pelaporan keuangan. Proses penyusunan anggaran dan revisi anggaran dapat dilakukan menggunakan SAKTI yang dapat mencegah terjadinya pagu minus. SAKTI juga membuat proses penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) baik yang berjenis Ganti Uang Persediaan (GUP), Langsung (LS), dan lainnya menjadi lebih cepat karena dilakukan secara elektronik. Proses penerimaan dan pencatatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pun dapat dilakukan secara otomatis dalam satu sistem SAKTI.

Peneliti menganggap bahwa baik SINTAG dan SAKTI memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara khususnya di Biro Keuangan BPK. SINTAG memiliki peranan dalam melakukan pengendalian terhadap adanya potensi kerugian negara akibat kelalaian atau kesalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Sedangkan SAKTI berperan dalam menghasilkan data dan informasi yang konsisten sejak perencanaan hingga pelaporan serta memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerimaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanpa harus hadir secara fisik ke KPPN.

Namun, terdapat prosedur-prosedur pada proses kerja SINTAG dan SAKTI yang sebenarnya sama atau berulang. Informasi yang dihasilkan SINTAG dan SAKTI juga memiliki format dan karakteristik yang berbeda sehingga perlu dianalisis. Sejatinya, pada SINTAG dan SAKTI masing-masing terdapat keunggulan atau kelebihan yang sangat bermanfaat yang seharusnya dapat diintegrasikan agar tercipta pengelolaan keuangan negara yang modern, andal, terpercaya, dan akuntabel sesuai motto Biro Keuangan BPK.

Atas dasar itulah, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis proses kerja dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh SINTAG dan SAKTI dan kemudian merekomendasikan Model Integrasi SINTAG dan SAKTI yang dapat diterapkan dalam proses pertanggungjawaban keuangan negara pada Biro Keuangan BPK.

Setelah menguraikan latar belakang masalah sebelumnya, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengambil judul tesis:

“Model Integrasi Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) Dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, dapat ditemukan bahwa masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dua pekerjaan yang sama atau berulang pada masing-masing akses aplikasi terutama oleh pengguna (*user*) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran;
2. Banyaknya perbedaan operasional fitur dan fungsi penginputan serta pelaporan antara aplikasi SINTAG dan SAKTI;
3. Terdapat ketidaksesuaian akun pembebanan, selisih nilai realisasi anggaran, dan perbedaan sisa pagu anggaran antara aplikasi SINTAG dan SAKTI;
4. Penyelesaian surat pertanggungjawaban keuangan negara mulai dari pembuatan dokumen SPJ sampai pembayaran tagihan menjadi lebih lambat.

C. Rumusan Permasalahan

Peneliti telah menentukan fokus permasalahan penelitian ini yaitu Model Integrasi Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan hasil analisis dari proses kerja dan kualitas informasi yang dihasilkan kedua sistem tersebut.

Rumusan masalahnya bisa dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses kerja SINTAG dan SAKTI dilihat dari perspektif orientasi pengguna (*user orientation*) dan keunggulan operasional (*operational excellent*)?
2. Bagaimanakah kualitas informasi yang dihasilkan SINTAG dan SAKTI dilihat dari aspek akurasi informasi (*accurate*) dan ketepatan waktu informasi (*timelines*)?
3. Bagaimanakah Model Integrasi SINTAG dan SAKTI yang dapat diterapkan di Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk

1. Menganalisis proses kerja Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

2. Menganalisis kualitas informasi yang dihasilkan Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
3. Menyusun sebuah Model Integrasi Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dapat diterapkan di Biro Keuangan BPK.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Peneliti memiliki harapan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Pembangunan Negara khususnya Manajemen Keuangan Negara yang memanfaatkan teknologi informasi digital dan dapat dijadikan referensi untuk kegiatan penelitian yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti memiliki harapan agar penelitian ini dapat memberikan solusi bagi pemimpin Biro Keuangan BPK dalam menerapkan sebuah Model Integrasi SINTAG dan SAKTI agar tercipta proses pertanggungjawaban keuangan negara yang modern, andal, terpercaya, dan akuntabilitas sesuai dengan slogan Biro Keuangan BPK.